



PENETAPAN

Nomor: 84/Pdt.P/2021/PA.Sel.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SELONG Kelas I B yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Nikah yang diajukan oleh:

Mulyadi bin Tamrin kesban, Umur 41 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat tinggal di Bagek Pongkor, Dusun Paok Lombok Utara, Desa Paok Lombok, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur., selanjutnya disebut sebagai Pemohon I.

Rohiyah binti Amaq Reba, Umur 40 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Tempat tinggal di Bagek Pongkor, Dusun Paok Lombok Utara, Desa Paok Lombok, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur., selanjutnya disebut sebagai Pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara

Setelah mendengar keterangan Pemohon I, Pemohon II dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan surat Permohonannya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong Nomor: 84/Pdt.P/2021/PA.Sel tanggal 04 Februari 2021, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri yang menikah secara syariat agama Islam pada Kamis 20 November 2013 di Bagek Pongkor, Dusun Paok Lombok Utara, Desa Paok Lombok, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur., dengan wali nikah Wali Hakim Pemohon II bernama H. Husen bin Nunrum, dan orang-orang yang hadir pada saat itu sebagai saksi antara lain adalah H. Marsudin bin Amaq Reha dan Samsudin bin Amaq Minahat dengan maskawin Rp 3.0000.000.- dibayar tunai;

Hal. 1 dari 6 Penetapan. No. 84 /Pdt.P/2021/PA.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Pemohon I adalah anak dari pasangan suami istri (Tarmin) dengan (Ajiyah) dan Pemohon II anak dari pasangan suami istri (Rahman) dengan (Inaq Sudar);
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Duda dan Pemohon II berstatus Janda Hidup;
4. Bahwa antara pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai keturunan 2 orang anak bernama : 1. Urwatul Wusqo 2. Muhammad Nadhma Fisyama'
6. Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, dan selama itu pula, Pemohon I dan Pemohon II tetap bergama Islam dan tidak pernah bercerai;
7. Bahwa sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki kutipan akta nikah, karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama setempat, sementara pada saat ini Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan akta nikah tersebut untuk alas hukum dalam mengurus pembuatan akta kelahiran, yang memerlukan penetapan pengesahan nikah;
8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah orang yang tidak mampu/miskin sebagaimana Surat Keterangan Miskin yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Paok Lombok, Kecamatan Suralaga, Kabuapten Lombok Timur nomor: 401/018/PL/II/2021, tanggal 04 Januari 2021 dan telah dibebaskan dari biaya perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Selong cq Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Hal. 2 dari 6 Penetapan. No. 84 /Pdt.P/2021/PA.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (Mulyadi bin Tamrin kesban) dengan Pemohon II (Rohiyah binti Amaq Reba) yang dilaksanakan pada Kamis 20 November 2013 di Bagek Pongkor, Dusun Paok Lombok Utara, Desa Paok Lombok, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur.;
3. Membebaskan pemohon dari biaya perkara;

SUBSIDAIR

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditentukan para Pemohon datang menghadap ke persidangan kemudian dibacakan surat Permohonan tersebut dan isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sebelum mempertimbangkan pokok perkara terlebih dahulu mempejari dalil-dalil yang diajukan Pemohon sebagai dasar mengajukan permohonan pemohon ;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan pokok perkara setelah membaca secara seksama dalil-dalil permohonan Pemohon maka yang menjadi permasalahan dalam perkara ini pada pokoknya apakah beralasan menurut hukum bagi Pemohon mengajukan itsbat nikah;

Menimbang, bahwa para Pemohon mendalilkan pernikahannya dilaksanakan saat pemohon masih terikat hubungan perkawin dengan orang lain .

Menimbang, bahwa pernikahan poligami yang dilangsungkan oleh para Pemohon tanpa ada penetapan pengadilan yang menyatakan memberikan izin kepada Pemohon I untuk melangsungkan perkawinan dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa terhadap fakta tersebut Majelis Hakim mengemukakan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2018 yang menyatakan bahwa "*Permohonan itsbat nikah poligami atas dasar nikah sirri meskipun dengan alasan untuk kepentingan anak harus dinyatakan tidak dapat diterima. Untuk menjamin kepentingan anak dapat diajukan permohonan asal-usul anak*".

Hal. 3 dari 6 Penetapan. No. 84 /Pdt.P/2021/PA.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon patut untuk dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklard);

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Selong Nomor: W22-A4/350 /HK.05/II/2021, tanggal , Maka Pemohon I dan Pemohon II dibebaskan dari membayar biaya perkara ini dan selanjutnya dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Selong tahun : 2020, Nomor : DIPA- 005.04.2.309111/2021, tanggal 01 Februari 2021 sebesar Rp.210.000,00,- (Dua Ratus Sepuluh Ribu Rupiah);

Memerhatikan, pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklard);
2. Membebankan biaya perkara kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Selong tahun : 2020, Nomor : DIPA- 005.04.2.309111/2021, tanggal 23 November 2020 sebesar Rp.210.000,00,- (Dua Ratus Sepuluh Ribu Rupiah);

Demikian perkara ini diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 24 Februari 2021 M bertepatan dengan tanggal 12 Rajab 1442 H oleh kami **Drs. H. Hamzanwadi, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Apit Farid, S.H.I.** dan **Hapsah, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim–Hakim Anggota dan **Hj. Patahiyah, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri pula oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota,

ttd

Apit Farid, S.H.I.

ttd

Hapsah, S.H.I.

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. Hamzanwadi, M.H.

Hal. 4 dari 6 Penetapan. No. 84 /Pdt.P/2021/PA.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,
ttd
Hj. Patahiyah, S.H.I.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Proses : Rp. 50.000,00
 2. Biaya Panggilan : Rp. 150.000,00
 3. Biaya Meterai : Rp. 10.000,00
- Jumlah : RP. 210 000,00
(Dua Ratus sepuluh Ribu Rupiah)

Salinan sesuai aslinya
Pengadilan Agama Selong
Panitera,

H. Khairil Anwar, S.H., M.H.

Hal. 5 dari 6 Penetapan. No. 84 /Pdt.P/2021/PA.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 6 dari 6 Penetapan. No. 19 /Pdt.P/2021/PA.Sel.